

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik di Kota Solok memang terbentuk, namun tidak sepenuhnya bersifat kelembagaan formal, melainkan berkembang secara kultural dan semi-terstruktur. Lembaga seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kandung menunjukkan adanya pola peran yang relatif konsisten dalam kegiatan literasi politik, terutama sejak tahun 2017, melalui keterlibatan dalam sosialisasi Pemilu, penyampaian pesan politik dalam forum adat, serta kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun tidak diikat oleh aturan formal atau dokumen kelembagaan yang baku, pola peran tersebut tetap berjalan efektif karena didukung oleh legitimasi sosial dan kultural yang kuat di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, indikator yang menunjukkan bahwa peran tersebut menghasilkan literasi politik dapat dilihat dari perubahan pada aspek pemahaman, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap politik. Masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur Pemilu, tetapi juga mulai memahami pentingnya partisipasi politik, mampu menilai informasi politik secara lebih rasional, serta menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Namun demikian, literasi politik yang dihasilkan masih berada pada tahap dasar, yaitu peningkatan kesadaran (*political awareness*), dan belum sepenuhnya mencapai tingkat literasi yang kritis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola peran pemangku adat dalam mendorong literasi politik di Kota Solok terbukti ada dan berfungsi, namun masih memerlukan penguatan agar dapat menghasilkan dampak yang lebih merata dan mendalam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku adat di Kota Solok, yaitu LKAAM dan Bundo Kandung, memiliki peran strategis dalam mendorong literasi politik masyarakat. Ketiganya membentuk jejaring sosial yang berfungsi sebagai saluran utama penyebaran informasi politik di tengah masyarakat. Kearifan lokal menjadi medium penting yang memungkinkan pesan politik diterima dengan lebih terbuka, karena disampaikan oleh tokoh yang memiliki kedekatan emosional dan legitimasi sosial. KPU berperan sebagai fasilitator dalam merancang dan mengoordinasikan program literasi politik. Sementara itu, LKAAM tampil sebagai otoritas adat yang memegang pengaruh sosial tinggi di komunitasnya, berperan menjaga kepercayaan publik terhadap pesan politik yang disampaikan. Di sisi lain, Bundo Kandung menjadi penggerak pendidikan politik berbasis nilai-nilai perempuan dan budaya minangkabau, yang memperkuat dimensi moral dan sosial dari literasi politik tersebut.

Keterpaduan peran antaraktor mencerminkan kejelasan fungsi yang saling melengkapi. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan kegiatan literasi politik, tetapi juga memperdalam pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi. Proses komunikasi politik berlangsung secara natural melalui ruang sosial adat, menjadikan partisipasi politik masyarakat lebih berbasis kesadaran, bukan sekadar kepatuhan terhadap ajakan formal. Dalam perspektif teori jaringan sosial Coleman, hubungan antara KPU, pemangku adat, dan masyarakat menunjukkan terbentuknya modal sosial yang kuat. Kepercayaan menjadi unsur pengikat utama dalam aliran informasi politik. LKAAM dan Bundo Kandung berperan sebagai simpul strategis dalam struktur jaringan yang menghubungkan nilai-nilai adat dengan sistem politik modern. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan sosial-budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam praktik literasi politik yang adaptif dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan di atas serta merujuk pada penelitian mengenai Analisis Peran Pemangku Adat sebagai *Best Practice* dalam

mendorong Literasi Politik Masyarakat di Kota Solok, maka peneliti memiliki saran secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, pada penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana peran pemangku adat (LKAAM dan Bundo Kandung) berkontribusi dalam mendorong literasi politik masyarakat melalui kerja sama dengan KPU Kota Solok. Peran adat yang berbasis legitimasi sosial terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman politik masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai literasi politik perempuan melalui kontribusi nyata yang dilakukan oleh Bundo Kandung Kota Solok, atau meneliti peran generasi muda adat (pemuda/pemudi) dalam memperluas literasi politik berbasis kearifan lokal.
2. Secara praktis, terdapat beberapa saran terhadap upaya KPU Kota Solok bersama pemangku adat dalam mendorong literasi politik masyarakat di Kota Solok:
 - a. KPU Kota Solok perlu membuat buku laporan tahunan khusus yang mendokumentasikan seluruh kegiatan literasi politik bersama pemangku adat, sehingga dapat dievaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan tersebut.
 - b. KPU Kota Solok dapat menyusun SOP khusus bagi pemangku adat yang dilibatkan dalam kegiatan literasi politik, sehingga mereka memiliki kejelasan peran masing-masing dan perlu adanya jadwal kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan berkesinambungan antara KPU, LKAAM dan Bundo Kandung.